

MENANGKAP POTENSI BESAR BISNIS KARBON RI

POTENSI BISNIS KARBON DI INDONESIA

-  Potensi nilai ekonomi yang dapat mencapai Rp120 triliun per tahun.
-  Adanya Dasar Hukum Baru: Perpres No. 110 Tahun 2025
-  Pengakuan Terhadap Standar Internasional
-  Peluang Menjadi Pusat (Hub) Karbon Asia Tenggara
-  Dukungan Proyek Berbasis Alam (Nature-Based Solutions)
-  Dampak Positif bagi Masyarakat Lokal
-  Daya Tarik Investasi Hijau
-  Dukungan Kelembagaan Pemerintah
-  Mendorong Inovasi dan Transisi Energi
-  Peluang Sinergi Global dan Transfer Teknologi

Indonesia menatap serius potensi besar dalam perdagangan karbon. Potensi penghasilan dari bisnis yang satu ini diperkirakan bisa mencapai maksimal Rp120 triliun per tahun. Potensi besar Indonesia dalam bisnis ini tak lepas kekayaan hutan dan ekosistem alami. Indonesia memiliki sekitar 125 juta hektare hutan yang menjadikannya sebagai terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Hutan-hutan ini berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) alami, menyerap jutaan ton CO₂ setiap tahun. Selain hutan tropis, mangrove Indonesia adalah yang terluas di dunia (±3,36 juta ha) mampu menyimpan karbon 3–5 kali lebih banyak per hektare dibandingkan hutan darat. Jika dihitung, potensi kredit karbon dari sektor kehutanan dan lahan basah Indonesia bisa mencapai ratusan juta ton CO₂ per tahun. Potensi karbon hayati atau nature-based solutions (NBS) dari Kawasan hutan termasuk ekosistem pesisir ini dapat mendukung pengembangan perdagangan bursa karbon Indonesia (IDX Carbon). Dimana proyek dan program pengurangan emisi karbon akan menghasilkan karbon kredit yang dapat diperjualbelikan di bursa karbon. Keseriusan pemerintah menangkap potensi dalam bisnis ini terbukti dari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Kemudian Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Pengarah untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

BACA HAL 11...

SEBANYAK 300 BUMD RUGI HINGGA RP5,5 TRILIUN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan setidaknya terdapat 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp5,5 triliun. Ratusan BUMD yang merugi itu merupakan sekitar 28% dari total BUMD yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Indonesia yang sebanyak 1.091 unit.

Berdasarkan jenis usaha, 300 BUMD rugi tersebut berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kemudian, 127 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan 4 BUMD yang bergerak di bidang industri agro.

Lalu, ada 5 perusahaan Jaminan Perkreditan Rakyat (Jamkrida). Ada 12 perusahaan migas daerah, 8 BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan pasar, 7 di sektor pariwisata rugi, dan 112 BUMD aneka usaha lainnya juga tercatat masih mengalami kerugian.

Meski begitu, sebanyak 678 BUMD atau sekitar 62 persen sudah berhasil mencetak laba. Sementara 113 lainnya belum melaporkan hasil kinerja keuangannya.

"300 BUMD rugi pak. Itu jumlah uang yang ada di BUMD itu lebih kurang Rp1.240 triliun asetnya, jadi ini potensial," ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah (KPID), dikutip lewat kanal Resmi Kemendagri, Selasa (21/10/2025).

Melihat kondisi itu, Tito mengusulkan pembentukan satuan baru di bawah Kementerian Dalam Negeri yang khusus menangani BUMD. Usulan tersebut kini tengah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian terkait.

"Ini kemudian kami mengusulkan kepada Bapak Presiden, melalui Menpan, Mensesneg, sekarang sedang proses Pak, yang di Kementerian Dalam Negeri, ada Ditjen yang mengurus Badan Usaha Milik Daerah," ujar Tito.

Menurut Tito, keberadaan Direktorat Jenderal khusus BUMD diharapkan bisa membuat pengelolaan perusahaan milik pemerintah daerah lebih profesional dan efisien. Sebab, kerugian yang dialami BUMD juga berdampak langsung pada keuangan daerah.

"Kalau BUMD rugi, Pemda jelas akan ikut rugi," tegasnya.

Dia menjelaskan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp 1.300 triliun, dengan aset BUMD senilai Rp 1.240 triliun dan dividen yang dihasilkan sebesar Rp 13,02 triliun.

Dari total APBD itu, Rp 919 triliun bersumber dari Transfer ke



Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
(foto Kompas)

Daerah (TKD) Kementerian Keuangan, sementara Rp 402 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan perolehan laba hanya 1,9% dari total aset. Total laba BUMD tercatat mencapai Rp 29,6 triliun dan jumlah rugi sebesar Rp 5,5 triliun. Lalu untuk laba bersihnya mencapai Rp 24,1 triliun.

Lantas apa yang menyebabkan ratusan BUMD merugi? Tito menyebut hal itu karena lemahnya tata kelola BUMD ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah dewan pengawas, komisaris, jumlahnya 1.993 artinya Dewan Pengawas Komisaris lebih banyak dibandingkan direksinya, 1.911.

"Dan juga terjadi kelemahan pengawasan baik internal oleh BUMD yang bersangkutan juga eksternal karena ada 342 BUMD yang belum memiliki satuan pengawas internal, tapi pengawasan eksternal juga belum maksimal," kata dia dilansir *financedetik*.

Sementara itu, jumlah BUMD sehat tercatat hanya sebanyak 346 BUMD atau 42% dari total 823 BUMD. Tito menyoroti kurangnya tata kelola dalam BUMD tersebut, di mana mereka kerap mengeluarkan modal besar namun imbal hasilnya tidak sepadan.

Ia pun mencontohkan, ada BUMD yang mengeluarkan modal sebesar Rp 30 miliar, namun keuntungan yang diperolehnya hanya Rp 87 juta dalam periode satu tahun. Selain itu, banyak juga yang struktur organisasinya diisi oleh tim sukses

(timses) pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kurang profesional.

"Kemudian ketidaksesuaian pada waktu membentuk BUMD dengan potensi daerah. Potensi daerahnya bidangnya pertanian, tapi bicaranya masalah konstruksi, BUMD-nya konstruksi. Nggak tepat. Padahal potensi lain, potensinya pariwisata, tapi kemudian masuknya ke masalah tambang. Nggak cocok gitu," aja Tito, ditemui usai rapat.

"Akhirnya (BUMD) nggak hidup, nggak jalan. Dan akhirnya meminta, supaya hidup diberikan suntikan dari APBD. APBD-nya disuntik, bukan untuk membuat dia sehat, untuk biaya operasional. Tambah tekor lagi," sambungnya.

Atas kondisi tersebut, sebagai pembina sekaligus pengawas, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar kewenangan untuk mengawasi BUMD langsung diberikan kepada eselon I yakni dengan membentuk Direktorat Jenderal BUMD. Sebab selama ini pengawasan dilakukan oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) yang merupakan eselon III.

"Kalau dia ke lapangan, koordinasi sama kepala daerah, kalau gubernur mungkin terlalu jauh. Pasti dikasih, ketemu nanti diwakil-wakilin semua, ketemu bupati pun mungkin susah. Kalau dia dirjen, lain lagi. Dia bisa kumpulkan semua stakeholder daerah, termasuk yang di pusat, juga daya dorongnya lebih tinggi. Itu kita harapkan, saran kita yang pertama, dari Kasubdit, naikan jadi Dirjen

“

Dan juga terjadi kelemahan pengawasan baik internal oleh BUMD yang bersangkutan juga eksternal karena ada 342 BUMD yang belum memiliki satuan pengawas internal, tapi pengawasan eksternal juga belum maksimal. Kemudian ketidaksesuaian pada waktu membentuk BUMD dengan potensi daerah. Potensi daerahnya bidangnya pertanian, tapi bicaranya masalah konstruksi, BUMD-nya konstruksi. Nggak tepat. Padahal potensi lain, potensinya pariwisata, tapi kemudian masuknya ke masalah tambang. Nggak cocok gitu,"

TITO KARNAVIAN
Menteri Dalam Negeri

BUMD," katanya.

Kata Tito, dengan adanya Ditjen BUMD, ke depan tidak akan lagi perusahaan milik pemerintah daerah (Pemda) yang merugi. Menurutnya, jika BUMD rugi, Pemda jelas akan ikut merugi, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk operasional APBD mencapai sekitar Rp1.300 triliun), dengan total aset yang dimiliki oleh BUMD senilai Rp1.240 triliun dan jumlah dividen yang dihasilkan mencapai Rp13,02 triliun.

"Yaitu Rp919 triliun dari TKD Kementerian Keuangan dan kurang lebih Rp402 triliun itu adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," sambungnya. (han,ist/lut)

PUAN: PERLU RESPONS STRATEGIS HADAPI LONJAKAN INFLUENZA A

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus influenza marak, termasuk influenza A. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan perlunya respons strategis dan terintegrasi dalam menghadapi lonjakan ini

Puan mengatakan peningkatan kasus ini bukan hanya menjadi indikator risiko kesehatan yang meningkat, tetapi juga pe-ringatan penting agar pemerintah segera memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.

"Meningkatnya kasus influenza di Indonesia, dan termasuk tren di negara tetangga harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperkuat sistem surveilans dan sigapnya fasilitas kesehatan di seluruh daerah," ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Puan menambahkan, sinergi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah serta kementerian terkait juga harus diperkuat, termasuk dalam menangani faktor risiko lingkungan seperti polusi udara dan kondisi hunian yang memudahkan penyebaran virus.

"Peningkatan kasus Influenza A ini menjadi pengingat penting bahwa kita harus terus berinvestasi dalam ketahanan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan kita harus siap menghadapi penyakit musiman seperti influenza yang sering dianggap ringan, tapi sebenarnya bisa berdampak serius jika diabaikan," katanya.

Puan menandakan lonjakan kasus Influenza A ini menunjukkan bahwa tidak boleh lengah. Jika tidak ditangani serius, ini bisa membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas.

Seperti diketahui, Kemenkes mengingatkan masyarakat potensi lonjakan kasus influenza A, khususnya subtipe H3N2, yang kini mulai mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui sistem FluNet, Kemenkes menyatakan sebagian besar kasus influenza di Indonesia terkait dengan varian H3N2.

Namun, hingga saat ini belum ada rincian spesifik mengenai wilayah di Indonesia yang mencatat jumlah kasus tertinggi. Tren peningkatan kasus influenza A juga terlihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang

didominasi virus influenza tipe A.

Kasus influenza A, khususnya subtipe H3N2 kini dilaporkan mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu lonjakan terbesar terjadi di Thailand, dengan 61 kematian dari 702.308 kasus sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2025.

Terkait hal ini, Puan menegaskan perlunya respons strategis dan terintegrasi dalam menghadapi lonjakan ini. "Penguatan sistem kewaspadaan dini di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, menjadi keharusan. Kita harus memastikan deteksi dan respons cepat agar penanganan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran," paparnya.

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang harus terus dijaga. "Masyarakat harus terus diingatkan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, seperti memakai masker di tempat ramai, menjaga sirkulasi udara yang baik, serta melakukan vaksinasi influenza bila vaksin sudah tersedia," jelas Puan.

Sejumlah studi klinis menunjukkan influenza A menjadi penyebab dominan pasien dewasa dirawat karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan rata-rata lama rawat inap 9 hingga 10 hari, lebih panjang dibandingkan paparan virus lain.

Bila mayoritas kasus flu akan sembuh dalam 1 hingga 2 minggu,



Ketua DPR RI, Puan Maharani.

tetapi pasien dengan influenza A cenderung mengalami demam lebih lama, batuk berkepanjangan, dan komplikasi seperti pneumonia sekunder yang membuat masa rawat inap lebih panjang.

Sebab itu, Puan mendorong Pemerintah agar memastikan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas pelayanan kesehatan memadai, terutama di daerah padat penduduk. "Apalagi anak kecil dan lansia dilaporkan merupakan kelompok paling rentan terhadap infeksi berat akibat influenza A. Maka sistem kesehatan nasional harus diperkuat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat saat terinfeksi penyakit," tegasnya.

Puan pun mendorong Pemerintah memberikan langkah pencegahan tambahan, khususnya bagi kelompok rentan. "Pemerintah bisa memperkuat dengan vaksinasi flu kepada kelompok berisiko tinggi, seperti anak-anak, lansia, dan yang memiliki penyakit bawaan," imbau Puan. Cucu Bung Karno itu juga mendorong masyarakat untuk disiplin perilaku hidup sehat. Puan meminta masyarakat waspada gejala influenza yang berat, seperti demam tinggi dan sesak napas.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi IDAI, dr Nastiti Kaswandani, mengutip HaiBunda

mengatakan virus influenza jadi salah satu kontributor munculnya infeksi pada anak. Influenza sendiri dibagi menjadi tipe A, B, C, dan D. Pembagian dibuat berdasarkan susunan protein di permukaan. Influenza A merupakan jenis yang paling memicu gejala parah, sedangkan B biasanya lebih ringan.

"Yang paling sering menyebabkan masalah itu influenza A. Dia [influenza A] bisa bikin pandemi, dia bisa menyebar dengan menimbulkan banyak korban," ujar Nastiti.

Dalam kondisi parah, influenza A bisa memicu sejumlah komplikasi. Misalnya saja pneumonia dan bronkitis. (han,rls,ist/lut)



Meningkatnya kasus influenza di Indonesia, dan termasuk tren di negara tetangga harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperkuat sistem surveilans dan sigapnya fasilitas kesehatan di seluruh daerah,"

PUAN MAHARANI
Ketua DPR RI

BEBERAPA GEJALA INFLUENZA A

1. Demam jadi salah satu tanda utama adanya infeksi.
2. Nyeri sendi, flu juga sering kali memicu nyeri pada persendian dan otot dan bisa membuat tubuh terasa lemas.
3. Batuk dan pilek merupakan tanda flu yang paling umum.
4. Sakit kepala terjadi karena infeksi yang memicu peradangan dan respons imun tubuh membuat aliran oksigen ke otak berkurang.
5. Sakit tenggorokan juga menjadi gejala umum dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) seperti influenza atau yang disebabkan virus/bakteri lainnya.
6. Tubuh lemas terjadi akibat penurunan energi, yang disebabkan oleh kerja keras tubuh melawan infeksi di dalamnya.
7. Diare, tak semua orang mengalami diare saat terserang influenza. Diare saat influenza lebih sering terjadi pada anak.



DKPP Bongkar Skandal Jet Mewah KPU 59 PENERBANGAN SENILAI RP 90 MILIAR

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap temuan mengejutkan dalam sidang etik terhadap para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga pengawas etik itu menyatakan bahwa pesawat jet pribadi jenis Embraer Legacy 650 yang disewa KPU dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 90 miliar, ternyata lebih banyak digunakan untuk perjalanan non-prioritas dan tidak sesuai tujuan awal.

Dalam sidang yang digelar Selasa (21/10/2025), anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkap, pengadaan pesawat tersebut dilakukan melalui kontrak sewa dukungan kendaraan untuk monitoring dan evaluasi logistik Pemilu 2024, dengan kode RUP469 dan sumber dana dari APBN. Kontrak itu berlangsung antara Januari hingga Februari 2024, dan diumumkan melalui metode e-purchasing pada 6 Januari 2025.

"Terungkap dalam sidang bahwa pagu anggaran pengadaan sewa pesawat jet pribadi untuk monitoring logistik Pemilu 2024 mencapai Rp 90 miliar," kata Raka Sandi.

DKPP mencatat, jet pribadi itu digunakan hingga 59 kali penerbangan, namun sebagian besar tidak mengarah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana alasan pengadaan. Justru, penerbangan tersebut banyak menuju daerah dengan akses penerbangan komersial yang mudah.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa penggunaan pesawat mewah tersebut melanggar prinsip efisiensi.

"Dari 59 kali penerbangan, sebagian besar bukan ke daerah 3T. Bahkan, daerah yang dikunjungi memiliki penerbangan komersial yang memadai," ujar Ratna.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui pesawat tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan distribusi logistik, antara lain monitoring gudang logistik, bimbingan teknis KPSS, penguatan kelembagaan pasca-pemilu, penyerahan santunan untuk petugas ad hoc, serta pemantauan PSU di Kuala Lumpur. Salah satu penerbangan bahkan dilakukan ke Bali, dengan agenda monitoring sortir dan pelipatan surat suara.

DKPP menilai tindakan tersebut tidak hanya tidak efisien, tapi juga menunjukkan adanya gaya hidup mewah yang tidak pantas bagi pejabat publik yang menggunakan dana rakyat.

"Para teradu memilih menggunakan jet pribadi jenis Embraer Legacy 650 yang eksklusif dan mewah. Ini tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu," tegas Ratna.



(Ilustrasi) Petugas KPU menaikkan logistik Pemilu 2024 ke atas helikopter saat hendak didistribusikan ke berbagai TPS di Timika, Papua Tengah (12/2/2024). (AFP.dok)

Atas pelanggaran itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam pejabat KPU, yaitu Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan empat anggota Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, serta August Mellaz. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno juga ikut dijatuhi sanksi etik karena turut

terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan.

Sementara itu, anggota KPU Betty Epsilon Idroos menjadi satu-satunya pihak yang bebas dari sanksi DKPP, karena tidak ikut menandatangani berita acara pleno pengadaan jet pribadi dan memilih menggunakan penerbangan komersial dalam setiap

perjalanan dinasny.

"DKPP memutuskan merehabilitasi nama baik Teradu Enam, Betty Epsilon Idroos, dan memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito. (wid,rls,kcm/dya)

POIN-POIN TEMUAN UTAMA SOAL PENGGUNAAN JET PRIBADI OLEH KPU

- **Sumber Anggaran:**
Dari APBN melalui paket "sewa dukungan kendaraan distribusi logistik."
- **Jumlah Penerbangan:**
59 kali; mayoritas tidak menuju wilayah 3T.
- **Kejanggalan Kontrak:**
Dua kontrak oleh PT Alfalima Cakrawala Indonesia dengan nilai melebihi pagu awal (indikasi mark-up).
- **Efisiensi:**
Banyak penerbangan ke daerah dengan penerbangan komersial; dinilai tidak efisien dan tidak proporsional.
- **Tujuan Penggunaan:**
Dipakai untuk kegiatan non-logistik seperti monitoring, bintek KPSS, penguatan kelembagaan, dan perjalanan luar negeri (Kuala Lumpur).
- **Alasan KPU:**
Dalih keterbatasan waktu kampanye (75 hari) dinilai tidak relevan oleh DKPP.
- **Perencanaan:**
Tidak ada dasar perencanaan yang jelas; penggunaan jet dianggap gaya hidup mewah.
- **Putusan DKPP:**
Ketua, anggota, dan Sekjen KPU melanggar kode etik (asas efisiensi & profesionalitas – Peraturan DKPP No. 2/2017).
- **Ultimatum:**
Anggaran tidak sah wajib dikembalikan; jika tidak, berpotensi proses hukum lanjut.



efisien.

"KPU ini kan bisa dengan zoom kalau hanya rapat, kalau pemantauan ke daerah ya cukup dengan pesawat komersil, berbagi tugas antara komisioner," tuturnya. (tin,min,ist/dya)

KPU Terancam Langgar Aturan Keuangan Negara

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menilai penggunaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki urgensi dan berpotensi menyalahi aturan penggunaan anggaran negara. Menurutny, tindakan tersebut menunjukkan pola gaya hidup mewah yang tidak pantas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Penggunaan anggaran negara, kata Boyamin, memiliki prosedur yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dalam kasus ini, KPU dinilai tidak memiliki dasar perencanaan yang sah.

"KPU pasti perencanaannya tidak ada, alasannya kan mendadak. Itu omong kosong saja. Makanya DKPP tidak menerima alasan itu," ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyatakan penggunaan jet pribadi itu tidak sah,

maka penggunaan anggarannya juga menjadi tidak sah.

"Konsekuensinya harus dikembalikan. Kalau mereka rela mengembalikan, ya kita anggap dimaafkan, tapi kalau tidak, harus diproses secara hukum. Itu berarti dugaan korupsi," kata Boyamin.

Boyamin menilai, tindakan menggunakan jet pribadi lebih menunjukkan perilaku pamer ketimbang kebutuhan mendesak. Ia membandingkan tindakan tersebut dengan pejabat negara lain yang lebih berhati-hati menggunakan fasilitas mewah.

"Presiden saja jarang-jarang menggunakan private jet, menteri-menteri lembaga lain juga tidak. Firli (eks Ketua KPK) saja dulu saya adukan ke dewan pengawas karena bergaya hidup mewah," katanya.

Menurut Boyamin, KPU tidak memiliki alasan mendesak untuk menggunakan pesawat pribadi. Jika hanya untuk rapat atau pemantauan ke daerah, kata dia, hal itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih

Bocoran Perpres Makan Bergizi Gratis DAPUR DILARANG MASAK SEBELUM TENGAH MALAM

Pemerintah resmi menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini akan menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan makanan sehat bagi pelajar. Salah satu ketentuan paling menonjol dalam Perpres tersebut adalah larangan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasak sebelum pukul 00.00 atau tengah malam.

Aturan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem distribusi pangan nasional yang lebih higienis, efisien, dan transparan. "Kami sudah sepakat mengimbau dist Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyebut aturan larangan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasak sebelum pukul 00.00 atau tengah malam bertujuan menjaga kesegaran makanan hingga sampai di tangan anak-anak sekolah.

"Mulai sekarang, dapur SPPG tidak boleh memasak sebelum pukul 12 malam. Masakannya harus dimulai pukul dua dini hari agar makanan tetap segar dan tidak basi sebelum dikirim ke sekolah," ujar Nanik usai menghadiri Town Hall Meeting satu tahun Kemenko Bidang Pangan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Selain pembatasan waktu memasak, Perpres MBG juga mengatur sistem produksi bertahap (batch cooking) sesuai jadwal pengiriman. Misalnya, makanan untuk siswa PAUD dan TK dimasak lebih awal dibandingkan untuk SD dan SMA. "Setiap batch harus diproses terpisah agar kualitasnya terjaga," tambah Nanik.

Tak hanya soal waktu, Perpres ini juga mewajibkan setiap dapur MBG untuk memenuhi standar kebersihan tinggi. Lantai dapur harus dilapisi epoksi agar tahan air, mudah dibersihkan, dan mencegah naiknya kuman dari bawah tanah. Selain itu, area pencucian alat makan harus dipisahkan dari area pencucian bahan makanan.

"Kita tegakkan aturan sanitasi. Lantai harus diepoksi, pencucian ompreng dan sayuran tidak boleh bercampur, dan ruang pemorsian harus berpendingin udara agar makanan tidak cepat basi," tegasnya.

112 SPPG Ditutup

Dalam proses penegakan standar tersebut, BGN tak segan memberi sanksi berat. Berdasarkan data resmi, sudah ada 112 dapur SPPG ditutup

sementara karena tidak mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. "Kami evaluasi satu per satu. Jika ditemukan pelanggaran serius, operasional langsung dihentikan," ungkap Nanik.

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Perpres MBG kini sudah rampung dan siap disosialisasikan ke seluruh daerah. Ia menjelaskan, aturan baru ini juga memperjelas koordinasi antar kementerian. Kemenkes bertugas mengawasi pelaksanaan program, Kementerian Pertanian dan KKP membina produsen bahan pangan,



(Ilustrasi) Karyawan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Gagakipat, Ngemplak, Boyolali, sedang mempersiapkan makanan untuk makan bergizi gratis. (Dok)

sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga menangani penyaluran bagi ibu hamil dan menyusui.

"Perpres ini sudah final, tinggal dibagikan. Di dalamnya juga termuat sanksi administratif hingga penghentian operasional bagi SPPG yang melanggar SOP," kata Dadan.

Investigasi BGN menemukan, banyak dapur MBG belum memenuhi standar pendinginan ruangan dan sanitasi, yang berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi makanan. Karena itu, Dadan menegaskan, pengawasan lapangan

akan diperketat dan sanksi diperluas jika ada indikasi kelalaian.

Perpres ini tidak hanya menata dapur, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan nasional agar lebih stabil dan transparan. Dari pengawasan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga penyajian, seluruh tahapan kini terstandar dan diawasi ketat oleh BGN serta kementerian terkait. (wid,rls,ant/dya)

Istana Sebut Masih Disempurnakan, Siap Terbit Pekan Ini?

PENYUSUNAN Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki tahap akhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan, draf aturan tersebut tengah disempurnakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

"Masih dalam tahap penyempurnaan lintas kementerian. Jadi bukan berarti belum ada, tapi kami ingin betul-betul memastikan semua masukan dan kejadian belakangan ini diakomodasi," ujar Prasetyo di kawasan Monas, Jakarta.

Menurutnya, penyempurnaan ini penting untuk menjamin agar pelaksanaan program makan bergizi gratis benar-benar efektif dan sesuai tujuan awal Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan gizi anak bangsa.

"Kita ingin program ini berjalan sebaik-baiknya. Minggu ini harus selesai. Tapi bukan berarti karena Perpres belum ada, programnya berhenti, tetap berjalan seperti biasa," tegasnya.

Prasetyo menambahkan, keberadaan Perpres ini nantinya bukan untuk memulai, melainkan memperkuat dan memperbaiki sistem yang sudah berjalan. "Sekarang programnya tetap jalan, Perpres hanya untuk menyempurnakan pelaksanaannya agar lebih maksimal," katanya.

Tetap Rp10.000/Porsi

Pemerintah menegaskan belum akan menaikkan anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), besaran tersebut masih memadai untuk sebagian besar wilayah di Indonesia, kecuali daerah dengan harga bahan pangan jauh lebih tinggi seperti Papua dan Maluku.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan hasil evaluasi terbaru menunjukkan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah masih relevan dan efisien.

"Belum ada revisi. Rp10.000 itu masih cukup, kecuali untuk wilayah tertentu seperti Papua dan Maluku, di mana harga bahan bakunya

ANGGARAN & REALISASI BGN 2025

- **Anggaran Utama:**
Rp 71 triliun dalam APBN 2025.
- **Dana Cadangan:**
Rp 100 triliun disiapkan untuk fleksibilitas program.
- **Penyerapan:**
Sekitar Rp 99 triliun terserap dari total anggaran dan cadangan.
- **Sisa Anggaran:**
Rp 70 triliun dikembalikan ke kas negara karena tidak terserap.
- **Realisasi:**
Rp 20,6 triliun (29% dari pagu) hingga 3 Oktober 2025.
- **Penerima Manfaat:**
31,2 juta orang di seluruh Indonesia.



memang berbeda jauh," ujar Nanik saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Nanik mengakui bahwa perbedaan geografis dan kondisi ekonomi antarwilayah memengaruhi kebutuhan anggaran program tersebut. Harga bahan pangan di kawasan timur Indonesia, katanya, memang tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa atau Sumatera. (tin,ist/dya)

Polemik Pasar Blimbing, Wali Kota Malang Cek Ketidakpatuhan Pihak Ketiga

MALANG- Nasib perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan PT KIS bakal segera diputuskan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengaku tengah meneliti secara menyeluruh berbagai fakta dan bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini terkait dengan proyek revitalisasi Pasar Blimbing.

"Sesuai hasil legal opinion dari kejaksaan tinggi tahun 2022, ada inventarisasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau dari pihak ketiga memang tidak bisa menindaklanjuti, semua fakta sudah kami kumpulkan, dan target-target yang saya sampaikan tidak bisa dipenuhi, ya saya putuskan," ujar Wahyu, dikutip pada Selasa (21/10/2025).

Meski belum menyebut waktu pasti, Wahyu menegaskan keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Ia menilai, langkah ini harus disertai bukti dan dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan dampak hukum bagi pemerintah daerah di kemudian hari.

"Segera. Doakan saja segera.

Karena untuk mencari data dan melengkapi data itu tidak mudah. Kita harus punya data yang jelas, supaya keputusan saya tidak menimbulkan dampak hukum," tegasnya.

Wahyu menjelaskan, pihaknya telah mempelajari seluruh tahapan kerja sama antara Pemkot Malang dan PT KIS. Mulai dari proses penandatanganan perjanjian, perencanaan site plan, penolakan pedagang, hingga sejumlah perubahan rancangan bangunan.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut kini menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan. "Jangan sampai kita mengambil satu tujuan yang salah. Nanti kalau salah, kita bisa digugat juga. Harus ada dasar hukumnya," tambahnya.

Di sisi lain, Wahyu mengungkapkan perbaikan Pasar Blimbing belum bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena PKS dengan PT KIS masih berlaku. Meski demikian, Pemkot telah mengusulkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuka kemungkinan penggunaan APBD dalam perbaikan sementara.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menilai langkah paling realistis untuk mempercepat pembangunan Pasar Blimbing adalah dengan memutuskan kerja sama antara Pemkot Malang dan PT KIS. Ia menegaskan, selama kontrak kerja sama masih berlaku, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan menggunakan dana daerah.

Arief menyebut kondisi Pasar Blimbing saat ini sudah tidak layak dan perlu segera diperbaiki. Ia berharap, setelah status hukum dan PKS tuntas, Pemkot dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membangun kembali pasar tersebut.

"Harapan saya, APBD bisa turun untuk memperbaiki pasar. Tapi eksekutif bilang masih akan koordinasi dengan BPK. Ya tidak apa-apa, kami tunggu. Yang penting Wali



Pasar Blimbing, Kota Malang. (Santi/Lentera)

Kota segera bertindak," ujarnya.

Menurut Arief, lahan Pasar Blimbing merupakan aset milik Pemkot Malang, sehingga pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menata ulang kawasan tersebut. Ia juga menilai aspirasi pedagang yang meminta pemutusan kerja sama merupakan langkah wajar. (Santi/Dya)

DPRD Kabupaten Malang Soroti Dapur MBG Tak Bersertifikat Higiene: Setop Sementara

Ilustrasi: salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kabupaten Malang)



MALANG- DPRD Kabupaten Malang merekomendasikan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khusus di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Rekomendasi ini disampaikan

sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program. Agar sesuai dengan ketentuan kesehatan dan keamanan pangan.

"Sesuai ketentuan, kami merekomendasikan agar layanan MBG di dapur lainnya yang belum mengantongi SLHS distop dulu sampai dokumen terbit," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, dalam pernyataan resminya, dikutip pada Selasa (21/10/2025).

Dimainnya, sebagian besar dapur MBG di Kabupaten Malang belum memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi sebagaimana diatur pemerintah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten

Malang, dari 80 SPPG yang telah terbentuk, baru satu yang memiliki SLHS. Yakni di SPPG Lanud Abd Saleh, Kecamatan Pakis.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dari total 80 SPPG tersebut, sebanyak 61 dapur sudah beroperasi dan 27 lainnya masih belum berjalan. Dari jumlah itu, Dinkes Kabupaten Malang telah memberikan pelatihan penjamah pangan kepada 46 dapur, sedangkan 20 dapur telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan.

Menurut Zulham, tahapan lain yang kini tengah berproses meliputi pemeriksaan sampel air, sampel makanan, serta uji teknis lain oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Ia menilai, selama masa uji coba program MBG, terdapat sejumlah kelonggaran dalam pemenuhan prosedur teknis yang seharusnya dijalankan secara ketat.

"Sebaiknya karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap. Baru nanti operasional jalan

lagi," ungkapnya.

Zulham mengingatkan, meskipun kepemilikan SLHS bukan jaminan mutlak terbebas dari risiko keracunan, sertifikat tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kesiapan dapur dalam mengelola makanan sesuai standar kesehatan.

Ditambahkannya, DPRD telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Beberapa laporan menyebut adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan di sekolah, meski hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya kasus keracunan yang signifikan.

Selain itu, DPRD juga menerima laporan terkait menu makanan yang dinilai tidak memenuhi standar gizi dan kebersihan di salah satu dapur penyedia MBG di Kecamatan Gedangan. Seluruh temuan dan masukan tersebut, kata Zulham, telah disampaikan ke instansi terkait untuk dilakukan pembenahan. (Santi/Dya)



Pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, Sanae Takaichi, bereaksi saat menerima tepuk tangan setelah terpilih sebagai perdana menteri, di Majelis Rendah Parlemen di Tokyo, Jepang, (21/10/2025).
(Foto: Reuters)

SANAE TAKAICHI RESMI JADI PM PEREMPUAN PERTAMA JEPANG

Jepang akhirnya resmi memiliki perdana menteri (PM) perempuan pertama pada Selasa (21/10/2025), setelah Sanae Takaichi berhasil mencapai kesepakatan koalisi pada detik-detik terakhir.

Takaichi menjadi perdana menteri kelima Jepang dalam beberapa tahun terakhir dan akan memimpin pemerintahan minoritas dengan formasi kabinet yang lengkap.

Dikutip dari AFP, Selasa (21/10/2025), parlemen Jepang menunjuk Takaichi, seorang pengagum Margaret Thatcher, sebagai perdana menteri pada hari Selasa (21/10/2025), setelah ia secara tak terduga memenangkan mayoritas suara dalam putaran pertama pemungutan suara. Ia akan resmi menjabat setelah bertemu dengan kaisar nanti.

Mantan drummer heavy metal ini pada 4 Oktober lalu terpilih menjadi ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), yang telah memerintah Jepang hampir tanpa henti selama beberapa dekade.

Enam hari kemudian, Partai Komeito, yang merasa tidak nyaman dengan pandangan konservatif Takaichi dan skandal dana gelap LDP, keluar dari koalisi mereka.

Hal ini memaksa Takaichi untuk membentuk aliansi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang reformis dan berhaluan kanan, yang ditandatangani pada Senin (20/10/2025) malam.

JIP ingin menurunkan tarif pajak konsumsi makanan menjadi nol, menghapuskan sumbangan perusahaan dan organisasi, serta mengurangi jumlah anggota parlemen.

Takaichi berjanji pada hari Senin (20/10/2025) untuk "memperkuat ekonomi Jepang, dan membentuk kembali Jepang sebagai negara yang dapat bertanggung jawab bagi generasi mendatang".

"Dia orang yang berpikiran kuat, terlepas dari statusnya sebagai perempuan," kata pensiunan Toru Takahashi, 76, kepada AFP di kota kelahiran Takaichi, Nara.

Selain itu, Takaichi, 64, yang kalah tipis dalam putaran kedua untuk memimpin LDP tahun lalu, juga harus bersiap menjamu Presiden AS Donald Trump yang akan mengunjungi Jepang

minggu depan.

Seorang mantan menteri keamanan ekonomi dan dalam negeri, Takaichi telah berulang kali menyebut Thatcher sebagai sumber inspirasi, dengan menyebut karakter dan keyakinannya yang kuat ditambah dengan "kehangatan kewanitaannya".

Ia mengatakan bahwa ia bertemu dengan Thatcher yang konservatif, seorang tokoh yang memecah belah dalam politik Inggris yang dikenal sebagai "Wanita Besi", dalam sebuah simposium tak lama sebelum kematian Thatcher pada tahun 2013.

Seperti Thatcher, latar belakang

Takaichi yang relatif sederhana ibunya adalah seorang polisi dan ayahnya bekerja di sebuah perusahaan mobil menonjol dalam sebuah partai di mana banyak pemimpinnya berasal dari keluarga politik elit.

Namun tidak seperti Thatcher yang dikenal karena penganggarannya yang ketat Takaichi adalah pendukung kemurahan hati fiskal dan kebijakan moneter yang mudah yang telah mengguncang kepercayaan investor terhadap ekonomi terbesar keempat di dunia.

Sebagai pendukung lama kebijakan stimulus "Abenomics" mendiang perdana menteri Shinzo

Abe, ia telah menyerukan peningkatan pengeluaran dan pemotongan pajak serta berjanji untuk menegaskan kembali pengaruh pemerintah atas Bank Jepang. (AFP, Reuters, ist/nei)

PROFIL SANAE TAKAICHI

- **JABATAN**
Perdana Menteri Jepang dan pemimpin LDP; perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut.
- **SEJARAH**
Lahir di Nara dari keluarga sederhana; ayah pegawai kantor; ibu polisi.
- **LATAR BELAKANG**
Lulusan Universitas Kobe, sempat belajar di AS; tertarik politik sejak kuliah meski bukan dari keluarga politisi.
- **KARIER POLITIK**
Anggota parlemen sejak 1993; pernah menjabat Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi di pemerintahan Shinzo Abe.
- **PANDANGAN & HOBI**
Ultra-konservatif, kritis terhadap China, mengagumi Margaret Thatcher, dan penggemar bisbol Hanshin Tigers.



namun untuk memerintah secara efektif, ia membutuhkan dukungan dari lebih banyak anggota parlemen oposisi, kata Tadashi Mori, seorang profesor politik di Universitas Aichi Gakuin.

"Kedua partai tersebut tidak memiliki mayoritas di kedua majelis, dan untuk memastikan pemerintahan yang stabil serta menguasai komite-komite parlemen utama, mereka perlu mengamankan lebih dari separuh kursi," ujarnya. (Reuters, ist/nei)

Hancurkan Batas Politik Lama

TOKOH konservatif garis keras, Sanae Takaichi, resmi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang pada Selasa, menembus batasan yang sebelumnya membatasi dinamika politik negara tersebut dan membuka peluang bagi pergeseran kebijakan yang lebih condong ke kanan.

Sebagai pengikut mantan Perdana Menteri Shinzo Abe dan pengagum Margaret Thatcher dari Inggris, Takaichi memperoleh 237 suara dalam pemilihan majelis rendah untuk menentukan perdana menteri berikutnya, melampaui mayoritas dari 465 kursi yang tersedia. Kemenangannya menjadi tonggak penting bagi Jepang, negara di mana laki-laki masih mendominasi pengaruh politik. Namun, keberhasilan ini juga berpotensi memicu pergeseran kebijakan yang lebih tegas ke arah kanan, terutama dalam isu imigrasi dan masalah sosial.

Kemenangan Takaichi dikonfirmasi setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya partai yang hampir

selalu berkuasa di Jepang pasca-perang menyetujui kesepakatan koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) yang berhaluan kanan pada hari Senin. Setelah bertahun-tahun menghadapi deflasi, Jepang kini menghadapi kenaikan harga, yang memicu ketidakpuasan publik dan meningkatkan dukungan terhadap kelompok oposisi, termasuk pendatang baru dari sayap kanan.

Seperti Abe, Takaichi diperkirakan akan mendukung belanja pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang melemah. Hal ini telah memicu apa yang disebut "perdagangan Takaichi" di pasar saham, yang menyebabkan Nikkei (.N225) terkoreksi, membuka tab baru Rata-rata saham mencapai rekor tertinggi, yang terbaru pada hari Selasa (21/10/2025). Namun, hal ini juga menyebabkan kekhawatiran investor tentang kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran tambahan di negara yang beban utangnya jauh melebihi output tahunan.

Takaichi memiliki cukup suara untuk menjadi perdana menteri,

SNACK RENDAH GULA DAN KALORI, SOLUSI TUBUH BUGAR

Ngemil seringkali dipandang sebagai kebiasaan yang kurang baik karena identik dengan makanan tinggi kalori, penuh gula, dan berpotensi menaikkan berat badan. Tak heran jika banyak orang memilih untuk menghindari camilan demi menjaga pola makan.

Padaahal, ngemil tidak selalu membawa dampak buruk. Selama memilih snack yang tepat, seperti camilan rendah kalori dan rendah gula, kita tetap bisa menikmati waktu ngemil dengan tenang. Bahkan, jika dilakukan dengan bijak, kebiasaan ini dapat membantu menjaga energi, meningkatkan konsentrasi, serta membuat tubuh lebih segar sepanjang hari.

Masih banyak yang beranggapan bahwa camilan sehat rasanya hambar, membosankan, atau tidak memberi rasa kenyang. Nyatanya, kini tersedia beragam pilihan snack rendah kalori dan rendah gula yang tetap lezat sekaligus mengenyangkan. Dari camilan alami seperti buah segar, sayuran, hingga kacang-kacangan, sampai produk modern yang diformulasikan khusus, semuanya bisa menjadi opsi menarik.

Berdasarkan sumber dari healthline.com, camilan sehat bukan hanya mendukung program diet atau menjaga berat badan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pola hidup seimbang yang membuat tubuh lebih bugar dan pikiran lebih rileks.

Artikel ini akan menghadirkan rekomendasi camilan rendah kalori dan rendah gula yang praktis, enak, dan menyehatkan.

Yogurt dengan Potongan Buah

Yogurt greek plain yang dipadukan dengan potongan buah segar merupakan pilihan camilan sehat yang tetap menyenangkan untuk dinikmati. Teksturnya yang creamy berpadu sempurna dengan kesegaran manis alami dari buah, menghadirkan sensasi lembut dan segar tanpa perlu tambahan gula berlebih. Kandungan protein yang tinggi pada yogurt membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sementara probiotiknya berperan penting dalam mendukung kesehatan sistem pencernaan.

Dengan tambahan buah-buahan segar seperti stroberi, kiwi, atau blueberry, camilan ini memberikan perpaduan serat, vitamin, serta nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Kombinasi rasa dan manfaat kesehatan tersebut menjadikan yogurt dengan buah segar pilihan ideal untuk dinikmati kapan pun tanpa rasa bersalah, baik sebagai camilan di sela aktivitas maupun sebagai hidangan ringan yang menyehatkan.

Edamame Rebus

Edamame rebus merupakan camilan praktis yang kaya nutrisi namun tetap rendah kalori, sehingga cocok dinikmati tanpa rasa khawatir.

Kedelai muda ini mengandung protein nabati, serat, serta berbagai vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk menjaga energi tubuh dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Cara penyajiannya pun sangat mudah, cukup dengan merebusnya menggunakan sedikit garam atau tanpa tambahan bumbu agar tetap sehat dan rendah natrium.

Chia Pudding dengan Susu Almond

Chia pudding dengan susu almond adalah camilan sehat yang lezat sekaligus rendah kalori, cocok untuk dinikmati kapan saja. Saat biji chia direndam, butiran kecil ini menyerap cairan dan berubah menjadi tekstur lembut menyerupai puding. Kandungan serat, protein, dan omega-3 di dalamnya memberikan manfaat besar bagi tubuh, seperti membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Smoothie Hijau

Smoothie hijau merupakan camilan sehat yang segar dan kaya akan nutrisi penting bagi tubuh. Minuman ini dibuat dari campuran sayuran hijau seperti bayam atau kale dengan buah-buahan segar, sehingga menghasilkan kombinasi serat, vitamin, dan antioksidan yang melimpah. Kandungan alamnya membantu meningkatkan energi, menjaga metabolisme tetap seimbang,

serta mendukung kesehatan sistem pencernaan secara menyeluruh. Rasa manis alami dari buah membuat smoothie hijau terasa lebih seimbang dan mudah dinikmati, bahkan bagi mereka yang biasanya kurang menyukai sayuran.

Oatmeal

Oatmeal adalah camilan bergizi tinggi yang dikenal mampu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Kandungan serat larut di dalamnya, terutama beta-glukan, berperan penting dalam mengontrol kadar kolesterol dan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Hal ini menjadikan oatmeal pilihan tepat bagi mereka yang ingin menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.

Dark Chocolate

Cokelat hitam dikenal sebagai camilan yang mengandung antioksidan tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan flavonoid di dalamnya membantu melawan radikal bebas serta mendukung fungsi jantung dan otak. Selain itu, cokelat hitam juga dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa rileks, menjadikannya pilihan yang menyenangkan untuk dinikmati di sela aktivitas.

Menariknya, cokelat hitam juga bisa membantu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan manis berlebihan. Agar manfaatnya maksimal, pilih cokelat hitam dengan kadar kakao minimal 70%, karena kadar kakao yang lebih tinggi mengandung lebih banyak antioksidan dan lebih sedikit gula tambahan. Dengan porsi yang tepat, camilan ini dapat menjadi alternatif sehat bagi pencinta rasa manis tanpa harus merasa bersalah. (nei,ist/dya)



PEKAN INI, HUJAN METEOR ORIONID SIAP HIASI LANGIT MALAM

Sepekan ini, langit akan dihiasi oleh pertunjukan cahaya kosmik yang memukau saat hujan meteor Orionid mencapai puncaknya. Fenomena ini menawarkan kesempatan emas untuk menyaksikan puluhan bintang jatuh.

Hujan meteor Orionid aktif sepanjang Oktober hingga awal November, tapi puncaknya akan terjadi pada 21-22 Oktober 2025 malam. Pada puncaknya, pengamat di lokasi yang gelap dan jauh dari polusi cahaya dapat menyaksikan antara 10 hingga 20 meteor per jam.

Keistimewaan tahun ini adalah puncak hujan meteor bertepatan dengan fase Bulan baru, yang berarti langit akan gelap gulita tanpa gangguan cahaya Bulan, menciptakan kondisi ideal untuk berburu meteor.

Meteor-meteor Orionid dikenal karena kecepatan dan kecerahannya. Seringkali, meteor ini meninggalkan "jejak" atau garis cahaya yang bersinar selama beberapa detik setelah melesat di atmosfer.

Pemandangan ini terjadi saat Bumi melintasi jalur puing-puing es dan debu yang ditinggalkan oleh komet paling terkenal sepanjang masa, Komet Halley.

Setiap kali Komet Halley mendekati matahari dalam orbit 76 tahunnya, ia melepaskan material yang kemudian menjadi hujan meteor saat bersinggungan dengan atmosfer Bumi.

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, perhatikan beberapa tips berikut:

Cari Lokasi Gelap

Pergilah ke tempat yang jauh dari lampu kota. Semakin gelap lokasi Anda, semakin banyak meteor redup



yang bisa Anda lihat.

Waktu Terbaik

Waktu pengamatan terbaik adalah setelah tengah malam hingga menjelang fajar. Ini adalah saat di mana titik radian hujan meteor, atau titik di langit tempat meteor tampak berasal, berada tinggi di langit.

Temukan Rasi Bintang Orion

Meskipun meteor dapat muncul di seluruh bagian langit, titik radianya berada di dekat konstelasi Orion, sang Pemburu.

Menggunakan rasi bintang ini sebagai patokan bisa membantu, namun pandangan terbaik didapat dengan mengamati area langit yang luas di sekitarnya.

Bersabar

Beri waktu sekitar 30 menit bagi mata Anda untuk beradaptasi sepenuhnya dengan kegelapan. Anda tidak memerlukan teleskop atau binokular, karena meteor paling baik dinikmati dengan mata telanjang.

Siapkan Kenyamanan

Kenakan pakaian hangat dan bawa kursi yang nyaman atau alas untuk berbaring, karena mengamati meteor adalah permainan menunggu.

Jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk menyaksikan serpihan Komet Halley yang terbakar di atmosfer dan melukis langit malam dengan cahaya gemerlapnya.

Soal Komet Halley

Hujan meteor Orionid disebabkan oleh puing-puing es dan debu yang ditinggalkan oleh Komet Halley saat melintasi tata surya. Menurut Jaringan Meteor Inggris (UK Meteor Network), meteor yang kita lihat hari ini berasal dari puing-puing yang ditinggalkan Komet Halley ratusan tahun yang lalu, karena orbit komet saat ini tidak membawanya cukup dekat ke Bumi.

ADVERTISEMENT Ketika Bumi melintasi puing-puing komet tersebut, "serpihan-serpihan komet" itu memanaskan saat memasuki atmosfer Bumi, menghasilkan "bintang jatuh" mengesankan yang melesat di langit. Komet Halley membutuhkan waktu sekitar 76 tahun untuk mengorbit matahari satu kali. (nei/ist,dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

INSPIRASI GAYA HOODIE UNTUK LOOK SEMI-FORMAL

Selama ini, hoodie sering dianggap sebagai pakaian kasual yang hanya cocok digunakan saat berolahraga, bersantai di rumah, atau sekadar hangout santai. Padahal, fashion item ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk tampil lebih serbaguna. Dengan sedikit sentuhan penataan gaya, hoodie dapat menjadi pilihan busana yang nyaman sekaligus modis untuk kesempatan semi-formal.

Tren street style dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa hoodie tidak lagi sekadar simbol gaya sporty. Banyak penggemar mode hingga selebritas dunia yang memadukan hoodie dengan item formal seperti blazer, celana berbahan kulit, atau aksesoris berkelas. Perpaduan ini menciptakan tampilan yang seimbang antara kesan chic, modern, dan effortless.

Bagi Anda yang mengutamakan kenyamanan tanpa ingin mengorbankan tampilan yang rapi, beberapa trik penataan hoodie dapat menjadi inspirasi. Hoodie favorit dapat diubah menjadi fashion statement yang memberikan kesan stylish, dewasa, namun tetap menyenangkan. Mengutip dari The Mom Edit, terdapat lima inspirasi gaya untuk memadukan hoodie agar tampil lebih semi-formal. Beberapa di antaranya bisa diterapkan dengan

mudah menggunakan item yang sudah Anda miliki di lemari, sehingga menciptakan tampilan baru tanpa perlu membeli banyak pakaian tambahan.

Tuck-in yang Rapi

Salah satu cara paling sederhana untuk membuat hoodie terlihat lebih stylish adalah dengan menerapkan teknik tuck-in. Gaya half tuck atau French tuck ke dalam jeans dapat menciptakan kesan kasual namun tetap rapi, sedangkan full tuck ke dalam celana memberikan tampilan yang lebih bersih dan sleek. Trik ini membantu menonjolkan bentuk tubuh tanpa menghilangkan kesan santai khas hoodie.

Teknik tuck-in juga sangat fleksibel untuk dipadukan dengan berbagai fashion item lainnya. Misalnya, menambahkan blazer di bagian luar atau mengenakannya bersama celana high-waist akan memberikan tampilan yang lebih proporsional dan modern. Kombinasi ini tidak hanya membuat gaya terlihat lebih rapi, tetapi juga memberi sentuhan chic yang effortless untuk berbagai kesempatan.

Tambahkan Aksesoris

Aksesoris kecil dapat memberikan pengaruh besar pada tampilan outfit yang sederhana. Tambahan seperti anting hoops, kalung tipis, atau gelang minimalis mampu membuat hoodie terlihat lebih rapi dan stylish. Sentuhan perhiasan ini tidak hanya mempercantik penampilan, tetapi juga menambahkan kesan elegan tanpa perlu usaha berlebihan. Selain itu, aksesoris juga dapat

menonjolkan sisi feminin sekaligus memberi sentuhan glam pada gaya yang awalnya kasual. Jika rambut ditata rapi ke belakang, perhiasan akan semakin terekspos dan menjadi statement yang menarik. Dengan paduan yang tepat, hoodie sederhana pun bisa tampak lebih chic dan modis untuk berbagai kesempatan.

Padukan dengan Oversized Blazer

Perpaduan hoodie dengan blazer oversized kini menjadi pilihan favorit para fashionista. Blazer berpotongan longgar memberikan siluet tegas yang kontras dengan tampilan kasual hoodie, menciptakan gaya yang modern dan sophisticated. Kombinasi ini menghadirkan keseimbangan antara formal dan santai, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin tampil stylish tanpa kehilangan kenyamanan.

Vegan Leather Pants

Jika Anda mulai bosan mengenakan jeans, cobalah beralih ke vegan leather pants sebagai alternatif yang lebih segar. Bahan kulit sintetis ini memberikan tampilan edgy sekaligus tampil lebih mewah dibanding denim. Saat dipadukan dengan hoodie, perpaduan keduanya menciptakan gaya yang unik—nyaman untuk dipakai sehari-hari, namun tetap memiliki kesan elegan dan modern.

Bermain dengan Warna Senada

Monochrome outfit selalu menjadi andalan untuk menciptakan tampilan yang chic dan effortless. Memadukan hoodie dengan item lain dalam warna senada seperti hitam, putih, beige, atau abu-abu dapat menghadirkan kesan minimalis yang modern.

Selain itu, permainan tone yang selaras membuat keseluruhan look terlihat lebih rapi dan elegan tanpa perlu banyak usaha.

Trik berpakaian satu warna ini juga memberikan ilusi tubuh yang lebih jenjang dan proporsional. Untuk hasil maksimal, pilih sepatu dengan nuansa warna serupa agar tampilan terasa lebih harmonis dan on point. Dengan sedikit perhatian pada detail warna, Anda bisa tampil stylish dan modern hanya dengan paduan sederhana.

Hitam

Warna hitam layaknya sahabat setia yang selalu bisa diandalkan, karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa pernah menghilangkan kesan elegan serta serbagunanya.

Abu-abu

Abu-abu merupakan pilihan tepat bagi Anda yang ingin menampilkan kesan tenang, kalem, dan elegan. Warna netral ini mudah dipadukan dengan berbagai warna lain, menjadikannya pilihan aman untuk gaya kasual maupun formal.

Navy

Jika merasa bosan dengan warna hitam, navy dapat menjadi alternatif yang tetap aman namun memberikan sentuhan warna yang lebih segar dan elegan.

Cokelat Tua

Warna cokelat menghadirkan kesan hangat dan alami, sehingga sangat cocok bagi Anda yang menyukai gaya vintage atau tampilan bernuansa luar ruang.

Merah Marun

Warna ini memberikan tampilan bold tanpa perlu terlihat mencolok seperti neon, cocok bagi Anda yang ingin tampil berbeda namun tetap memancarkan kesan elegan dan berkelas.

Mustard

Warna ini mampu membuat penampilan terlihat standout tanpa terkesan berlebihan. Padukan dengan warna-warna gelap agar tampilan tetap seimbang dan terlihat elegan.

Hoodie kini tidak lagi sekadar identik dengan gaya kasual, tetapi telah menjadi busana serbaguna yang dapat diubah menjadi tampilan semi-formal dengan penataan yang tepat. Dengan sedikit kreativitas dalam memadukan pakaian, hoodie dapat terlihat lebih modis dan berkelas.

(nei,ist/dya)

Gegara Tambang Ilegal, ...dari hal 1

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan potensi nilai perdagangan karbon di Indonesia dapat mencapai maksimal Rp120 triliun per tahun, terutama setelah pemerintah menerbitkan aturan baru ihwal ekonomi karbon. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Oktober 2025.

Untuk diketahui, Perpres No. 110/2025 ditujukan untuk memberikan pengaturan mengenai pengendalian perubahan iklim melalui penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

Regulasi itu turut mengatur ihwal alokasi karbon, penyelenggaraan nationally determined contribution (NDC) atau penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan negara, mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, berikut segala tata caranya.

"Potensinya itu ada 13,4 miliar ton CO₂ ekuivalen. Nah, minimum kalau kita menganggap 1 tonnya itu US\$5 saja, maka ada potensi minimum itu Rp41 triliun volume perdagangan dalam setahun atau bisa maksimum sekitar Rp120 triliun," ujarnya di kompleks istana kepresidenan, dikutip Selasa (21/10/2025) dilansir Bloombergtechnoz.

Perpres tersebut lebih fokus pada pengaturan nilai ekonomi karbon, sebagai tindak lanjut dari instrumen bursa karbon yang diluncurkan pada era Presiden Joko Widodo tetapi implementasinya masih belum maksimal.

Menyusul bursa karbon yang tidak berjalan optimal itu, pemerintah awal tahun lalu lantas meluncurkan perdagangan karbon internasional di bursa efek. Sayangnya, kata Raja Juli, instrumen tersebut juga tidak berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah Pak Presiden memahami apa yang menjadi permasalahan. Salah satu masalah utamanya adalah memang para investor lokal maupun internasional membutuhkan kepastian hukum," ujarnya.

Perpres baru tersebut dinilai mampu memberikan kepastian untuk mengundang investor dalam menanamkan modalnya di sektor perdagangan karbon. "Pak Presiden berjanji di depan forum PBB [untuk] menanam 12 juta hektare lahan kritis dengan melibatkan [investor]. Dengan

Perpres ini, ya dengan aturan terusnya, insyallah nanti akan banyak investor yang dahulu bisnisnya menebang, sekarang menanam untuk mendapatkan harga karbon yang lebih baik," kata Raja Juli.

Dalam perpres tersebut, pemerintah kini mengakui unit karbon non-Sertifikat Pengurang Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) yang mengikuti standar internasional seperti Verra dan Gold Standard. Pengakuan tersebut memungkinkan unit atau kredit karbon diperdagangkan baik di pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga diharapkan dapat mendorong ekosistem pasar karbon di Indonesia yang relatif mandek sejak 2023.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga September 2025, total volume transaksi perdagangan karbon hanya 1.606.056 ton CO₂e dengan akumulasi nilai Rp78,46 miliar.

Lebih lanjut, pengakuan atas unit karbon non-SPE GRK internasional sedikitnya akan memberikan tiga dampak terhadap pasar karbon Indonesia.

Pertama, daya tarik investasi akan meningkat. Perpres No. 110/2025 memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor. Kepastian hukum akan menarik investasi ke proyek-proyek yang berbasis alam di Indonesia.

Kedua, integrasi ke pasar global. Pengakuan pemerintah terhadap unit karbon non-SPE GRK menyelaraskan kerangka kerja nasional dengan standar global. Selain itu, Perpres No. 110/2025 diklaim memfasilitasi perdagangan karbon antarnegara, sesuai dengan Artikel 6 Paris Agreement.

Indonesia juga memiliki peluang untuk mengeksport kredit karbon, terutama berbasis alam ke negara atau perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

Ketiga, manfaat bagi masyarakat atau komunitas lokal. Standar internasional acap kali mewajibkan kriteria atau parameter manfaat sosial dan lingkungan bagi komunitas lokal.

Dengan makin banyaknya proyek yang mengikuti standar tersebut, potensi manfaat seperti perlindungan hak-hak masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil berpotensi meningkat.

Sistem baru penghitungan dan pelaporan emisi yang kredibel dan transparan atau measurement, reporting, and verification (MRV), sehingga membuat setiap kredit karbon yang diterbitkan akan merepresentasikan pengurangan emisi yang konkret, terukur, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah terkait karbon, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Komite Pengarah untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Wakil Ketua I dan II Komite Pengarah.

Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang diundangkan pada 10 Oktober 2025.

"Dalam rangka memberikan arah kebijakan, memimpin koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan instrumen NEK (Nilai Ekonomi Karbon) dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan, dibentuk Komite Pengarah," tulis Pasal 96, dikutip Selasa (21/10/2025).

Nantinya komite pengarah memiliki tugas memberikan arahan kebijakan dan memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga atas penyelenggaraan instrumen NEK untuk mencapai NDC, dan pengendalian Emisi GRK untuk pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.

Sebelumnya, Komite Pengarah ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua. Ini tertuang dalam aturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Perpres Baru Nomor 110 Tahun 2025 ini, maka aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dicabut.

Peluang dan tantangan bisnis karbon

Peluang perdagangan karbon di Indonesia masih terbuka luas. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan Pemerintah Indonesia

untuk mempercepat langkah menuju emisi nol (net zero emission).

Head of Centre for Climate Risk and Resilience UTS, Prof. Martina Linnenluecke, menjelaskan pasar karbon adalah mekanisme untuk mendorong dekarbonisasi dengan memfasilitasi perdagangan kredit emisi. Perusahaan bisa membeli kredit karbon sebagai "hak" untuk mengeluarkan sejumlah emisi gas rumah kaca dalam proses produksinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi satu ton karbondioksida (CO₂) ekuivalen.

Adanya pasar karbon sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberi insentif pada pengurangan emisi. Selain itu, pasar karbon mendorong investasi pada solusi-solusi berbasis alam seperti penghutanan kembali (reboisasi) dan restorasi lahan gambut.

Penerapan pajak karbon juga melengkapi mekanisme pasar karbon. Sebab, menurut Mona, ini memungkinkan harga produk yang dihasilkan dari proses produksi rendah karbon lebih murah ketimbang harga produk yang dihasilkan dengan proses tinggi emisi karbon. Kebiasaan konsumsi pun akan mulai berubah.

Martina sepakat pajak karbon sangat berperan dalam mendorong dekarbonisasi bila diimplementasikan secara tepat. Selain itu, supaya transisi menuju keberlanjutan bisa dipercepat, maka perlu mekanisme yang saling melengkapi.

Dengan adanya pasar karbon ini, menurut Martina, Indonesia berpeluang untuk menarik investasi hijau dan mendorong transfer teknologi rendah karbon. Di sini, banyak pembangunan berkelanjutan terkait kehutanan, energi baru terbarukan, dan proyek-proyek berbasis masyarakat yang bisa dilakukan.

Selain itu, Indonesia bisa menjadi hub perdagangan karbon di Asia Tenggara. Namun, beberapa tantangan menghambat penerapan pasar karbon di Indonesia. Martina menyebutkan ketidakpastian aturan, integritas pasar, dan infrastruktur menjadi hambatan.

Martina menegaskan diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, sektor swasta, institusi keuangan, akademisi dan masyarakat sipil. Selain itu, sinergi internasional juga harus dilakukan.

Pendekatan terintegrasi dalam kebijakan pasar karbon juga menjadi penting. Penetapan harga karbon (carbon pricing), misalnya, harus dilengkapi dengan aturan, subsidi energi bersih, serta riset teknologi rendah karbon. (han,ist/lut)

PENGHISAP ROKOK ILEGAL TERANCAM HUKUMAN 5 TAHUN PENJARA

Ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal bukan hanya pada produsen dan penjual saja, namun konsumen atau penghisap rokok ilegal pun terancam pidana cukup serius. Berdasarkan Undang-undang Bea Cukai, warga yang menghisap rokok ilegal bisa dikenakan sanksi pidana hukuman penjara hingga 5 tahun.

Sesuai Pasal 54 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Bea Cukai bahwa yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan konsumsi rokok ilegal itu dikenakan sanksi tindak pidana hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 200 juta," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Finari Manan, usai pemusnahan rokok ilegal di Bogor, Selasa (21/10/2025).

Ancaman hukuman tersebut untuk memberantas maraknya peredaran rokok ilegal yang mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan kajian Indodata Research Center, potensi kerugian negara akibat rokok ilegal pada 2024 mencapai sekitar Rp97,81 triliun.

Untuk itu, Bea Cukai lakukan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi rutin bertajuk 'Operasi Gurita'. Para periode Oktober 2025, operasi ini menyasar tiga wilayah yaitu Banten, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, mengungkapkan tujuan Operasi Gurita, antara lain menekan peredaran rokok ilegal melalui penindakan langsung di pasar dan jalur distribusi. Kemudian, memberikan edukasi dan sosialisasi peraturan cukai kepada pedagang dan masyarakat.

"Menciptakan iklim perdagangan yang sehat dengan menjaga persaingan yang adil bagi pelaku usaha barang kena cukai (BKC) yang taat aturan serta melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara," katanya dilansir Senin (20/10/2025).

Ia menandakan, Operasi Gurita merupakan kegiatan rutin untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang melibatkan operasi pasar, penyisiran warung dan toko, serta edukasi kepada masyarakat dan pedagang.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang mendapati peredaran rokok ilegal di sekitarnya agar melaporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui layanan pusat kontak Bravo B e a C u k a i d i <http://linktr.ee/bravobeacukai>.



Penghisap Rokok Ilegal Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

"Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan perdagangan yang sehat, adil, serta melindungi perekonomian nasional dari praktik-praktik ilegal yang merugikan negara," pungkask Budi.

Di satu sisi, Kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia kembali menuai sorotan. Meski pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026, sejumlah pengamat menilai struktur beban pajak yang sudah terlampaui tinggi tetap menjadi penyebab utama meningkatnya peredaran rokok ilegal di tanah air.

Di kawasan ASEAN, beban cukai dan pajak rokok Indonesia tercatat tinggi, totalnya dapat mencapai sekitar 67% untuk satu batang rokok. Sebagai contoh yang paling relevan, satu batang Sigaret Kretek Mesin (SKM), segmen terbesar dan yang paling banyak disusupi produk ilegal, memiliki komponen cukai 52 persen, pajak rokok sebesar 10 persen dari tarif cukai, serta PPN 9,9 persen dari Harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Angka ini jauh di atas rata-rata kawasan yang berkisar 55 persen.

Menurut Peneliti dari Universitas Padjadjaran, Satriya Wibawa, tingginya tarif cukai justru berimbas pada pergeseran konsumsi ke produk ilegal yang lebih murah. "Harga rokok legal di pasaran sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat. Kondisi ini membuka ruang bagi produsen dan

pengedar rokok ilegal untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan produk legal yang berpita cukai," ujar Satriya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Satriya menambahkan, kebijakan CHT yang terlalu berat memang bisa menekan konsumsi, tapi juga memukul industri tembakau dari sisi produksi dan tenaga kerja. "Produksi menurun, bahan baku dari petani tidak terserap maksimal, dan pada akhirnya industri menekan jumlah tenaga kerja yang berakibat pada lesunya industri dan maraknya rokok ilegal," jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, evaluasi kebijakan cukai perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya berpihak pada aspek fiskal, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial ekonomi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada 2026 diambil guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga keberlangsungan industri legal sekaligus memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal.

"Kita tidak ingin industri tembakau mati, tetapi juga tidak boleh dikuasai oleh pelaku ilegal. Pemerintah akan menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlangsungan ekonomi masyarakat," kata Purbaya pada awal Oktober 2025.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga



Sesuai Pasal 54 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Bea Cukai bahwa yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan konsumsi rokok ilegal itu dikenakan sanksi tindak pidana hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 200 juta,"

FINARI MANAN

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC) Jawa Barat

agar celah bagi peredaran rokok ilegal tidak melebar. "Selisih antara produk legal dan ilegal akan semakin besar. Kalau selisihnya makin besar, barang-barang ilegal justru akan makin banyak beredar," ungkapnya.

Menurut Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Mudi, keputusan pemerintah menahan kenaikan cukai merupakan kebijakan realistis di tengah kondisi industri yang sedang lesu. "Salah satu upaya menyelamatkan industri tembakau saat ini adalah dengan tidak menaikkan cukai terlebih dahulu. Penjualan rokok kita sedang tidak baik-baik saja dan rokok ilegal merajalela sehingga kebijakan cukai ini perlu diperbaiki," imbuhnya.

Data Euromonitor mencatat, 58 dari 83 negara mengalami lonjakan peredaran rokok ilegal dengan rata-rata pertumbuhan 13% per tahun. Negara dengan beban pajak tembakau di atas 60% umumnya menghadapi tingkat peredaran rokok ilegal yang lebih tinggi, kondisi yang kini menjadi tantangan serupa bagi Indonesia. (han,ist/lut)